

# Konsepsi Indo-Pasifik sebagai Sebuah Strategi Ketahanan Politik Luar Negeri Indonesia

Muhamad Jaki Nurhasya<sup>1</sup>

Staf Kementerian Luar Negeri RI, alumni master War Studies Department King's College London

## ABSTRAK

*Pergeseran norma interaksi global pada tataran Indo-Pasifik diwarnai oleh terjadinya kontestasi antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT)-Amerika Serikat (AS), konvergensi India-Jepang-Australia, serta dinamika kebijakan strategis Rusia. Guna mengantisipasi dinamika sistem strategis Indo-Pasifik, Indonesia telah mencetuskan konsepsi Indo-Pasifik yang memajukan inklusivitas, habit of dialogue, serta penyelesaian permasalahan kawasan secara damai melalui pendayagunaan building blocks di kawasan. Analisa dalam tulisan ini mempertegas sentralitas Indonesia untuk dapat mengambil peran sebagai aktor utama dan mempengaruhi konsepsi atas kawasan Indo-Pasifik. Secara lebih lanjut, tulisan ini merekomendasikan formulasi serta implementasi konsepsi Treaty of Friendship and Cooperation Indo-Pasifik pada tiga tataran secara sequential: a. pada tataran bilateral melalui pemanfaatan hubungan bilateral komprehensif dan strategis; b. pada tataran regional melalui pendayagunaan building blocks ASEAN, IORA dan SCO (sebagai non-member country); serta c. pada tataran praktis melalui pembangunan norma interaksi instrumen-instrumen militer dan otoritas keamanan maritim negara-negara Indo-Pasifik.*



## PENDAHULUAN

Dinamika hubungan internasional pada era kontemporer merupakan sebuah *litmus test* bagi arah kebijakan luar negeri Indonesia. Secara prinsipil, politik luar negeri (polugri) Indonesia yang mengedepankan prinsip bebas aktif telah menjadi pedoman yang memastikan ketahanan Indonesia dari deraan tonggak-tonggak besar interaksi kekuatan-kekuatan besar dunia. Bebas aktif sebagai prinsip polugri telah memastikan ketahanan Indonesia di tengah polarisasi kekuatan pada era Perang Dingin, tatanan baru dunia pada runtuhnya tembok Berlin, hingga ajakan Perang Global melawan terorisme yang dipimpin Amerika Serikat (AS) pasca peristiwa 9/11.

Pada perkembangannya, saat ini kembali terjadi sebuah pergeseran norma interaksi global. Hal ini setidaknya dipengaruhi oleh tiga hal yang mencolok : pertama, berkembangnya kekuatan dan pengaruh

negara-negara seperti Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan India dari segi ekonomi dan militer mempengaruhi interaksi negara-negara tersebut dengan kekuatan regional lain seperti AS, Australia, Jepang dan Rusia, kedua, semakin terhubungnya Lautan Hindia dengan Pasifik kian mempengaruhi interaksi keamanan dan ekonomi negara-negara di kedua kawasan lautan tersebut, ketiga, adanya interaksi yang bertemakan *pragmatisme* dan kontestasi yang mencolok pada hubungan kontemporer negara-negara di kawasan Lautan Hindia dan Pasifik.

Guna menjawab tantangan-tantangan perkembangan tersebut, Indonesia telah menghasilkan sebuah konsepsi Indo-Pasifik. Konsepsi dimaksud telah disampaikan secara politis oleh Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan penitik beratan pada pembangunan sistem regional yang bersifat inklusif guna mewujudkan habit of dialogue, serta mendayagunakan building blocks

guna mewujudkan kawasan yang bebas dan damai.

Tulisan ini bermaksud untuk membahas konsepsi perwujudan Indo-Pacific sebagai sebuah strategi ketahanan politik luar negeri Indonesia dan memberikan saran rekomendasi implementasi yang bersifat multi-level, meliputi tataran strategis, bilateral, dan praktis.

## PEMBAHASAN

### Dinamika Geopolitik Indo-Pasifik

Adanya tren pembentukan sistem baru di kawasan Indo-Pasifik disebut *Medcalf* (2014) sebagai reaksi negara-negara atas terciptanya sebuah sistem strategis yang terpicu akselerasi hubungan ekonomi dan keamanan di antara negara-negara di kawasan Pasifik Barat dan Lautan Hindia<sup>2</sup>. Senada dengan *Medcalf*, Mohan (2012) menyebut ekspansi kepentingan ekonomi, serta perkembangan kekuatan strategis dan diplomatik India dan RRT mempengaruhi kebijakan mereka atas kawasan yang secara historis merupakan kepentingan utama maritimnya<sup>3</sup>.

Mendahului *Medcalf* dan Mohan, Barry Buzan pada tahun 2003 telah memprediksi akan terciptanya sistem interaksi yang multikompleks di kawasan Asia, meski pada saat itu pertimbangannya lebih didasarkan pada interaksi keamanan para aktor di kawasan<sup>4</sup>. Pada hakikatnya, seperti yang telah disebut oleh *Medcalf* dan Mohan, interaksi keamanan hanya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terciptanya sistem dimaksud, yaitu interaksi ekonomi dan kepentingan geostrategis RRT,

India, dan kehadiran strategis AS yang mempengaruhi faktor lainnya seperti rute perdagangan dan energi, hubungan diplomatik dan juga strategis antara lautan Hindia dan Pasifik<sup>5</sup>. Kenyataannya pada saat ini, sebanyak 50% lalu lintas kontainer global melewati Lautan Hindia dan sebanyak 80% minyak mentah yang diproduksi di laut melewati alur-alur laut di Lautan Hindia menuju samudera Pasifik<sup>6</sup>.

Dilatarbelakangi kenyataan ini, beberapa negara kunci yang menjadi pemain utama telah menghasilkan konsepsi strategisnya yang bertemakan kontestasi dan konvergensi antara negara-negara terkait. Bagian dari tulisan ini akan berupaya melihat dinamika tersebut dan menjadi pendasaran bagaimana Indonesia dapat kemudian mengkonsepsikan strategi Indo-Pasifiknya.

### Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Amerika Serikat (AS): Sebuah Kontestasi

RRT dan AS merupakan salah satu pemain utama Indo-Pasifik yang ciri interaksinya bertemakan kontestasi. Pada satu sisi, Investasi RRT di Afrika dan ekstraksi RRT atas hasil alam di Afrika yang mencapai US\$ 200 Miliar pada tahun 2014 semakin mengetengahkan pentingnya jalur Lautan Hindia bagi RRT<sup>7</sup>. Dinamika perkembangan kekuatan agregat RRT di kawasan maritim Lautan Hindia dan Pasifik kemudian dipandang memiliki tendensi ekspansif oleh beberapa pihak. Hal ini terutama mengingat dua perkembangan strategi RRT yaitu “*Two-Ocean*” (*Liang ge Haiyang*) dan *The Belt Road Initiative (BRI)*.

Strategi *Two Ocean* merupakan implementasi dari doktrin Angkatan



Laut RRT “*Far Seas Operations*” yang telah digunakan sejak tahun 2005. Perubahan doktrin dimaksud dipandang Kupakar (2017) sebagai bentuk transformasi nyata doktrin maritim RRT yang mengindikasikan keinginan RRT untuk menciptakan kehadiran secara militer di kawasan Lautan Hindia guna memenuhi kepentingan keamanan energinya<sup>8</sup>.

Pada tahun 2017, RRT juga telah memasukkan *Belt and Road Initiative* (BRI) kedalam konstitusi partai komunis RRT. Pada praktiknya, RRT telah mengupayakan sebuah konsepsi *Maritime Silk Road (MSR)* Initiative sejak tahun 2013. Pada saat ini terdapat 11 negara yang terlibat dalam MSR di kawasan Lautan Hindia termasuk Australia, Bangladesh, Indonesia, Iran, Kenya, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Pakistan, Singapura dan Sri Lanka. RRT juga tengah mengupayakan *String of Pearls Ports Use Agreements* yang terbentang di kawasan Lautan Hindia mulai Sittwe di Myanmar, hingga Gwadar di Pakistan<sup>9</sup>.

Secara strategis, Scott (2017) menyebut keinginan RRT untuk mengendalikan Pelabuhan Gwadar di Pakistan terkait dengan kebutuhan RRT untuk menghindari permasalahan “*Malacca Dilemma*”, dimana kebutuhan energi RRT yang bersumber dari Timur Lautan Hindia dan melewati Selat Malaka dapat dipotong oleh Angkatan Laut AS atau India pada skenario konflik yang melibatkan negara-negara dimaksud<sup>10</sup>.

Pada sisi lainnya, penggunaan istilah “*Indo-Pasifik*” oleh Presiden AS Donald Trump dalam kunjungannya ke kawasan Asia pada tahun 2017 menunjukkan dinamika konsepsi dimaksud sebagai jangkar kebijakan luar negeri AS di

kawasan. Lingkup kontestasi antara Amerika Serikat dan RRT nampak kian jelas pada konflik di kawasan Laut China Selatan (LCS). AS terus menggencarkan *Freedom of Navigation Operations* (FON Ops) yang menjadi sebuah media bagi AS untuk melakukan Strategic Checking pada RRT yang sebelumnya dipersepsikan AS akan mengimplementasikan *Anti Access/Area Denial strategy* di kawasan LCS<sup>11</sup>. Adanya kontestasi antara AS dan RRT menjadi salah satu fitur utama yang mewarnai dinamika di Indo-Pasifik.

*“Secara prinsipil, politik luar negeri (polugri) Indonesia yang mengedepankan prinsip bebas aktif telah menjadi pedoman yang memastikan ketahanan Indonesia dari deraan tonggak-tonggak besar interaksi kekuatan-kekuatan besar dunia.”*

### Konvergensi Jepang, India, dan Australia

Salah satu fitur utama lain dari kawasan Indo-Pasifik adalah berkembangnya konvergensi koalisi “*Security Diamond*” antara Jepang, India, Australia dan Amerika Serikat. Perkembangan sistem *quadrilateral* ini dimulai dari eratnya hubungan antara Jepang dan India dalam mengantisipasi perkembangan di kawasan. Pada tahun 2007, Perdana Menteri Shinzo Abe dalam pidatonya di hadapan Parlemen India yang berjudul “*Confluence of The Two Seas*” telah menyampaikan

adanya dinamika saling keterkaitan antara Lautan Hindia dan Pasifik yang akan meningkatkan interaksi India dan Jepang<sup>12</sup>.

Pada pidato yang sama, Abe juga menyebut bahwa hubungan strategis Jepang - India akan berkembang menjadi sebuah “jaringan luas yang melingkupi Lautan Pasifik, yang juga akan melibatkan AS dan Australia” sebagai *‘like-minded democracies’* yang akan memastikan sebuah kawasan yang terbuka dan transparan<sup>13</sup>. Dorongan untuk membentuk sebuah koalisi antar empat negara tersebut berujung pada satu ronde konsultasi pada level senior officials di tahun 2007. Namun demikian, kerasnya tentangan RRT terhadap konsepsi dimaksud menghambat perkembangan lebih lanjut. Pada tahun 2008, Pemerintahan Australia di bawah Kevin Rudd menolak konsepsi *quadilateral* dimaksud<sup>14</sup>.

Namun, kian meningkatnya dinamika pengaruh RRT di kawasan mendorong kembali semangat pembentukan koalisi. Pada tindak lanjut hubungan strategis India dan Jepang dalam bentuk *“Special Strategic and Global Partnership”* di tahun 2014, Perdana Menteri Modi lebih jauh menyebut adanya negara-negara di kawasan Indo-Pasifik yang melaksanakan *“Vikas Vaad”* atau perkembangan yang damai dan sebaliknya ada juga negara yang melaksanakan *“Vistar Vaad”* atau negara yang berkembang secara ekspansionis<sup>15</sup>. Ucapan Perdana Menteri Modi tersebut dipandang banyak pihak sebagai tuding kepada dinamika ekspansionis RRT di kawasan Indo-Pasifik. Di lain pihak, Australia pada Buku Putih pertahanannya tahun 2013 telah menyebut secara jelas terciptanya sebuah *“Indo-Pacific Strategic*

*Arc”* yang mengharuskan Australia mengantisipasi kebangkitan kekuatan RRT dan mengimplementasikan strategi yang menitikberatkan interkoneksi lautan Hindia dan Pasifik melalui kawasan Asia Tenggara.

Pembentukan koalisi kembali digelorakan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe sejak terpilih kembali pada tahun 2012. Jepang mendorong pembentukan sebuah *“Security Diamond”* untuk menjaga kepentingan maritim empat negara koalisi. Dorongan Jepang yang disambut pandangan positif AS, India dan Australia berujung kepada terlaksananya konsultasi Senior Officials ke empat negara dimaksud pada pertemuan *East Asia Summit* (EAS) pada tahun 2017<sup>16</sup>.

### Rusia dan Indo-Pasifik

Dinamika kebijakan Rusia dalam mengantisipasi perkembangan strategi RRT dan negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik menjadi salah satu fitur yang mempengaruhi Indo-Pasifik. Bagi Moscow, strategi BRI RRT dapat menjadi tandingan dari konsep Eurasian Economic Union yang digagasnya<sup>17</sup>. Hal ini terutama mengingat penancangan konsep ini yang dilakukan oleh Presiden RRT Xi Jinping di Kazakhstan, yang notabene adalah aliansi utama Moskow di kawasan<sup>18</sup>.

Namun demikian, perkembangan situasi krisis Ukraina, serta hubungan yang kian memburuk dengan AS menyudutkan Moskow untuk bersikap lebih terbuka terhadap inisiatif RRT di kawasan Indo-Pasifik. Sebagaimana telah disampaikan oleh Lukin (2018) terdapat dua indikasi utama berubahnya sikap Russia atas RRT dalam strategi BRI : masuknya Russia dalam





*Asian Infrastructure Investment Bank* yang digagas RRT dan kesepakatan Presiden Xi dan Presiden Putin untuk menghubungkan konsepsi Eurasian Economic Union dengan Silk Road Economic Belt (SRIB) RRT pada tahun 2015<sup>19</sup>. Selain kedua hal tersebut, tergabungnya Rusia dalam organisasi regional Shanghai Cooperation Organization yang diprakarsai RRT berpotensi memfasilitasi kian sejalan-nya strategi Rusia dengan RRT di kawasan Indo-Pasifik<sup>20</sup>.

### Indonesia dan Indo Pasifik: Strategi Polugri dan Implementasi

Interaksi dan dinamika negara-negara di kawasan Lautan Hindia dan Pasifik mengakibatkan terciptanya sebuah sistem strategis yang relatif baru dan membutuhkan pendekatan serta penyesuaian strategis dari negara-negara yang berkepentingan. Pada konteks ini Medcalf (2014) menyebut sistem strategis sebagai serangkaian interaksi kekuatan geopolitik dimana perubahan pada satu bagian dari sistem akan mempengaruhi apa yang terjadi pada bagian lain dari system tersebut<sup>21</sup>.

Didasari hal tersebut, terdapat kebutuhan untuk melihat Indo-Pasifik sebagai sebuah sistem strategis. Hal ini sejalan dengan pandangan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa yang mengkonsepsikan adanya sebuah “*Dynamic Equilibrium*” pada tataran Indo-Pasifik. Penasihat keamanan nasional Perdana Menteri India Mahmohan Singh juga mendukung pandangan ini, dengan melihat adanya bahaya dari menyamaratakan solusi untuk permasalahan dari wilayah yang demikian luas<sup>22</sup>.

Melihat perkembangan dinamika kontestasi dan konvergensi negara-negara kunci Indo-Pasifik sebagaimana telah digambarkan oleh bagian tulisan sebelumnya, terdapat kebutuhan solusi konsepsi Indo-Pasifik yang dapat mengantisipasi terciptanya sebuah sistem multipolar yang saling berkontestasi di Indo-Pasifik.

Sentralitas Indonesia pada dinamika konsepsi Indo-Pasifik sendiri merupakan sebuah keniscayaan. Buku Putih Pertahanan Australia pada tahun 2013 menyebut kawasan Asia Tenggara sebagai pusat geografis dari konsepsi Indo-Pasifik<sup>23</sup>. Pada kenyataannya, sentralitas Indonesia pada interaksi *geostrategis* di kawasan Asia Tenggara seperti ASEAN menjadikan Indonesia sebagai aktor dengan pengaruh utama di kawasan. Oleh karenanya, adalah sebuah keniscayaan bagi Indonesia untuk dapat mengambil peran sebagai aktor utama dan mempengaruhi konsepsi atas kawasan Indo-Pasifik.

Menyadari dinamika-dinamika tersebut, pada tahun 2013 Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa pada pidatonya di Washington D.C. telah mengusulkan pembentukan sebuah konsepsi *Indo-Pacific Treaty of Friendship and Cooperation*<sup>24</sup>. Mendukung kebutuhan pembentukan treaty dimaksud, Ram (2015) melihat adanya keterbatasan dalam *Treaty of Amity and Cooperation ASEAN* yang meski sudah ditandatangani oleh negara-negara kunci seperti RRT namun dipandang belum dapat mengantisipasi dinamika Indo-Pasifik secara luas<sup>25</sup>.

Oleh karenanya, konsepsi *Indo-Pacific Treaty* perlu diwujudkan guna memajukan kepentingan Indonesia untuk memastikan norma-norma

interaksi hubungan yang bertumpu pada prinsip-prinsip perdamaian, inklusivitas dan memasukkan komitmen negara-negara yang terlibat dalam pengupayaan kerja sama strategis seperti maritime security, safety dan eksplorasi energiserta perdagangan secara damai.

Bagian tulisan ini akan berupaya merekomendasikan pembentukan sebuah *Indo-Pacific Treaty* yang diwujudkan secara sequential melalui pengupayaan pada tataran bilateral, regional dan pada tataran praktis.

### Tataran Bilateral

Adanya aktor-aktor negara kunci dalam konsepsi Indo-Pacific seperti telah dibahas pada bagian tulisan sebelumnya perlu menjadi pendasaran Indonesia untuk melakukan pendekatan bilateral sebagai tumpuan awal dalam pembentukan sebuah *Treaty Indo-Pacific*. Sejalan dengan pemahaman ini, Sambhi (2013), berpandangan bahwa tanpa adanya dukungan dari negara-negara kunci dalam sebuah *Indo-Pacific Treaty*, negara-negara di kawasan akan tetap bergantung kepada hubungan aliansi tradisionalnya untuk perlindungan ataupun dalam melakukan counterbalance terhadap kekuatan yang dianggap mengancam<sup>26</sup>.

Indonesia dapat mendayagunakan simpul-simpul hubungan bilateral komprehensif dan strategis yang telah dimilikinya dalam memastikan negosiasi Treaty Indo-Pacific yang bersifat inklusif dengan melakukan pendekatan terhadap negara-negara kunci seperti AS, India, Jepang, Australia dan Rusia sebelum memajukannya dalam aplikasi pada tataran regional dan praktis. Indonesia dapat memasukkan agenda pembahasan treaty pada tiap-

tiap *building blocks* bilateral yang dimilikinya dengan negara-negara dimaksud secara simultan guna memperoleh aspirasi serta berupaya memastikan komitmen negara-negara kunci.

Modalitas hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara kunci dapat menjadi tumpuan Indonesia dalam meminimalisir *trust deficit* sebagai sebuah hambatan utama yang disebut oleh Menlu Marty Natalegawa sebagai tantangan dalam mengantisipasi dinamika di Indo-Pasifik. Dengan melakukan pendekatan pertama kepada negara-negara kunci, Indonesia dapat mendorong pemahaman mengenai pentingnya pengupayaan "*common security*" bagi negara-negara dimaksud dalam perwujudan konsepsi Indo-Pasifik.

### Tataran Regional

Pada tahapan kedua, Indonesia dapat membawa konsepsi treaty Indo-Pasifik yang sebelumnya telah dikonsultasikan pada tataran bilateral dengan negara-negara kunci pada berbagai forum regional dan mengupayakan kesepahaman serta perangkat praktis pada organisasi-organisasi regional yang terkait. Pada tataran ini, setidaknya terdapat tiga instrumen regional kunci yang perlu untuk dilakukan *engagement* dalam perwujudan sebuah Indo-Pacific Treaty.

Pertama, cakupan perangkat ASEAN seperti ARF dan EAS menjadikan ASEAN sebagai instrumen regional yang amat berpengaruh dalam konsepsi Indo-Pasifik. Negara-negara kunci dalam konsepsi Indo-Pacific telah menyatakan pentingnya *engagement* terhadap ASEAN. Sebagai contoh, India menyiratkan hal ini dalam "*look-east*"



policy nya<sup>27</sup>. Indonesia sebagai negara yang memegang peranan utama di ASEAN dapat menggunakan tren ini untuk membangun pengimplementasian serta perwujudan konsepsi Indo-Pasifiknya pada tataran ASEAN.

Selain perangkat ASEAN, Indonesia juga perlu mendayagunakan Indian Ocean Ring Association (IORA) sebagai forum guna mendorong perwujudan serta pengimplementasian sebuah “*Indo-Pacific Treaty*”. Sebagai “pelopor dan satu-satunya organisasi regional di wilayah Samudera Hindia” prioritas kerja sama IORA yang meliputi keselamatan dan keamanan *maritime* serta fasilitasi perdagangan laut menjadikan IORA sebagai salah satu forum yang paling strategis dalam konsepsi Indo-Pasifik<sup>28</sup>. Trend dalam perkembangan organisasi IORA seperti dokumen strategis Jakarta Concord IORA yang pada tahun 2017 telah menyebut Lautan Hindia sebagai “*Zone of Peace*” juga mendukung perkembangan ini<sup>29</sup>.

Sebagaimana telah disampaikan oleh Waidyatilake, capaian IORA sebagai sebuah organisasi regional tidak terhitung strategis dalam kurun waktu 20 tahun sejak pembentukannya. Namun demikian, pelaksanaan IORA pada tataran *Leaders’ Summit* yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2017 dipandang sebagai titik balik IORA sebagai sebuah organisasi regional yang sentral dan proaktif<sup>30</sup>. Momentum ini perlu didayagunakan oleh Indonesia untuk kemudian mendorong pembahasan Treaty pada tataran regional.

Selain ASEAN dan IORA, Indonesia juga perlu melakukan pendekatan sebagai *non-member country* terhadap organisasi regional lain seperti *Shanghai Cooperation Organization*

yang melibatkan negara-negara kunci seperti RRT, Rusia dan negara-negara Asia Tengah. Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, Rusia mendayagunakan SCO guna menghubungkan konsepsi *Eurasian Economic Union* dengan *Silk Road Economic Belt* (SRIB) milik RRT. Outreach Indonesia kepada SCO dipandang perlu guna membantu perwujudan sebuah *Indo-Pacific Treaty* yang inklusif.

### Tataran Praktis

Instrumentalisasi kawasan Indo-Pasifik yang damai dan inklusif pada tahapan yang berkelanjutan perlu meliputi implementasi pada tataran praktis seperti interaksi antara instrumen-instrumen militer dan otoritas keamanan maritim negara-negara yang berkepentingan.

Indikasi adanya *urgensi implementasi* sebuah treaty Indo-Pasifik pada tataran praktis dapat dilihat dari adanya kenaikan pembangunan kapasitas otoritas keamanan laut seperti *coast guard* yang memiliki resiko dalam bentuk benturan terbuka antara institusi-institusi semi-militer ini<sup>31</sup>. Sebagai contoh, terjadinya *standoff* antara *coast guard* Vietnam dengan Indonesia di kawasan Natuna pada Bulan Mei 2017 serta insiden-insiden serupa antara Indonesia dengan *coast guard* RRT merupakan contoh urgensi nyata. Selain itu tindakan AS memperbesar volume bantuan strategis kepada *coast guard* Vietnam berpotensi menghasilkan ancaman bagi stabilitas regional dalam bentuk peningkatan agresivitas institusi Vietnam dimaksud. Hal ini tentunya kontra-produktif terhadap upaya Indonesia untuk memastikan perdamaian di kawasan LCS.



Selain peningkatan urgensi pada institusi keamanan laut, urgensi yang sama juga nampak pada tataran instrumen militer di kawasan Lautan Hindia. Sebagai salah satu indikasi, India tengah berupaya untuk melakukan counterbalance terhadap potensi ancaman RRT dengan menargetkan pembangunan dan penempatan 200 kapal perang pada tahun 2027<sup>32</sup>.

Guna mengantisipasi kian meruncingnya potensi-potensi konflik dimaksud, *Indo-Pacific Treaty* perlu memiliki turunan implementasi pada tataran praktis. Dalam hal ini, Indonesia perlu memastikan komitmen negara-negara yang berkepentingan di kawasan untuk dapat mengedepankan komunikasi dan pencarian solusi damai pada tiap insiden yang mungkin terjadi di masa mendatang melalui forum-forum diplomasi pertahanan serta pertemuan institusi keamanan laut yang terdapat di tataran ASEAN serta mendorong pembahasan isu dimaksud pada tataran IORA.

---

## PENUTUP

Interaksi geopolitik di tataran Indo-Pasifik yang bertemakan konvergensi dan kontestasi antara negara-negara yang berpengaruh di kawasan seperti RRT, AS, India, Jepang dan Rusia mendorong urgensi perwujudan sebuah *Indo-Pacific Treaty of Friendship and Cooperation* yang meliputi komitmen negara-negara di kawasan untuk menjaga *inklusivitas, habit of dialogue*, serta penyelesaian permasalahan kawasan secara damai.

Pembahasan yang telah dilaksanakan pada tulisan ini memperlihatkan sentralitas Indonesia sebagai negara yang amat berpengaruh dalam sistem strategis Indo-Pasifik. Dalam hal ini,

terdapat urgensi bagi Indonesia untuk memainkan peranan penuh dan memulai inisiatif pembentukan sebuah *treaty Indo Pasifik* melalui mekanisme *sequential* pada tataran bilateral, regional dan praktis.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Buzan, Barry. 2003. "Security Architecture in Asia : The Interplay of Regional and Global Levels." *The Pacific Review* 16 (2): 143-173. doi:10.1080/0951274032000069660.
- Commonwealth of Australia. 2013. *Defence White Paper 2013*. Diakses pada laman [http://www.defence.gov.au/whitepaper2013/docs/WP\\_2013\\_web.pdf](http://www.defence.gov.au/whitepaper2013/docs/WP_2013_web.pdf).
- Cronin, Patrick M. dan Baruah, Darshana M. 2014. "The Modi Doctrine for the Indo-Pacific Maritime Region". *The Diplomat*. Diakses pada laman <https://thediplomat.com/2014/12/the-modi-doctrine-for-the-indo-pacific-maritime-region/>
- Glaser, Bonnie S. 2014. *China's Grand Strategy in Asia*". Center for Strategic and International Studies. [https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy\\_files/files/attachments/ts140313\\_glaser.pdf](https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/attachments/ts140313_glaser.pdf)
- IORA. Jakarta Concord. Diakses pada laman [https://www.kemlu.go.id/Buku/JAKARTA%20CONCORD\\_FINAL\\_not%20signed.pdf](https://www.kemlu.go.id/Buku/JAKARTA%20CONCORD_FINAL_not%20signed.pdf)
- Kementerian Luar Negeri RI. *Indian Ocean Rim Association*. Diakses pada laman <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/IORA.aspx>



- Kupakar, “China’s naval base(s) in the Indian Ocean—signs of a maritime Grand Strategy?,” *Journal of Strategic Analysis*, 41.3, 2017
- Lukin, Artyom. 2018. Putin’s Silk Road Gamble. *The Washington Post*. Diakses pada laman [https://www.washingtonpost.com/news/worldpost/wp/2018/02/08/putin-china/?utm\\_term=.4ac96ab243c6](https://www.washingtonpost.com/news/worldpost/wp/2018/02/08/putin-china/?utm_term=.4ac96ab243c6)
- Ministry of Foreign Affairs of Japan (2007). “Confluence of the Two Seas”, pidato oleh H.E.
- Mr. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan kepada Parliament of The Republic of India. Diakses melalui laman <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/speech-2.html>
- Mohan, C. Raja. (2017). Donald Trump’s ‘Indo-Pacific’ and America’s India Conundrum. *ISAS Insights*. No 476.
- Mohan, C. Raja. (2017). Donald Trump’s ‘Indo-Pacific’ and America’s India Conundrum. *ISAS Insights*. No 476.
- Mohan, C. Raja. 2012. *Samudra Manthan: Sino-Indian Rivalry in the Indo-Pacific*. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.
- Natalegawa, M. M. (2013, May 16). An Indonesian Perspective on the Indo - Pacific. Keynote address pada CSIS conference on Indonesia. Washington, Washington D.C., United States: CSIS. Diakses pada laman [http://csis.org/files/attachments/130516\\_MartyNatalegawa\\_Speech.pdf](http://csis.org/files/attachments/130516_MartyNatalegawa_Speech.pdf)
- Nurhasya, Muhamad Jaki (2017). Indonesia’s Take on South China Sea White Hull Race. *The Jakarta Post*. Diakses pada halaman <http://www.thejakartapost.com/academia/2016/11/24/indonesias-take-on-south-china-sea-white-hull-race.html>
- Ram, Vignesh (2015). The Proposal for an Indo-Pacific Treaty of Friendship and Cooperation: A Critical Assesment. *Journal of ASEAN Studies*, Vol. 3, No. 1 (2015), pp. 22-31
- Rory Medcalf (2014) In defence of the Indo-Pacific: Australia’s new strategic map, *Australian Journal of International Affairs*, 68:4, 470-483, DOI: 10.1080/10357718.2014.911814
- Sambhi, N. (2013). Do we need an Indo-Pacific treaty? Braton, ACT: ASPI. Diakses pada laman <http://www.aspistrategist.org.au/do-we-need-an-indo-pacific-treaty/>
- Schubert, Jeff. (2017). New Eurasian Age: China’s Silk Road and The EAEU in SCO Space. Diakses pada laman <http://russianeconomicreform.ru/wp-content/uploads/2017/08/New-Eurasian-Age-with-Chinese-Silk-Road-and-EAEU-in-SCO-Space-Update.pdf>
- Scott, David. 2017. “Chinese Maritime Strategy for The Indian Ocean”. CIMSEC. Diakses pada laman <http://cimsec.org/chinese-maritime-strategy-indian-ocean/34771>
- Sheridan, Greg (2008). ‘How to lose friends’, *The Australian*. Diakses pada laman <http://www.theaustralian.com.au/archive/news/how-to-lose-friends/news>
- Waidyatilake, Barana (2017). The Indian Ocean Rim Association: Scaling Up?. *ISAS Working paper No 262*. <https://www.isas.nus.edu.sg/ISAS%20Reports/ISAS%20Working%20Papers%20>

No.%20262-%20The%20Indian%20Ocean%20Rim%20Association.pdf

1. Muhamad Jaki Nurhasya bekerja untuk Kementerian Luar Negeri. Memiliki gelar master dari War Studies Department King's College London sebagai Chevening Scholar dan Universitas Pertahanan Indonesia serta sarjana dari Universitas Parahyangan Bandung. Subjek ketertarikan/keahlian termasuk kajian Strategis politik keamanan Amerika Serikat, dinamika kawasan Asia Timur, kerja sama serta negosiasi pengadaan Alutsista, senjata pemusnah massal dan juga keamanan laut kontemporer. Pandangan yang disampaikan bersifat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan resmi institus
2. Rory Medcalf (2014) In defence of the Indo-Pacific: Australia's new strategic map, *Australian Journal of International Affairs*, 68:4, 470-483, DOI: 10.1080/10357718.2014.911814
3. Mohan, C. Raja. 2012. *Samudra Manthan: Sino-Indian Rivalry in the Indo-Pacific*. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.
4. Buzan, Barry. 2003. "Security Architecture in Asia: The Interplay of Regional and Global Levels." *The Pacific Review* 16 (2): 143-173. doi:10.1080/0951274032000069660.
5. Medcalf (2014)
6. Waidyatilake, Barana (2017). The Indian Ocean Rim Association: Scaling Up?. ISAS Working paper No 262. <https://www.isas.nus.edu.sg/ISAS%20Reports/ISAS%20Working%20Papers%20No.%20262-%20The%20Indian%20Ocean%20Rim%20Association.pdf>
7. Waidyatilake, Barana (2017). The Indian Ocean Rim Association: Scaling Up?. ISAS Working paper No 262. <https://www.isas.nus.edu.sg/ISAS%20Reports/ISAS%20Working%20Papers%20No.%20262-%20The%20Indian%20Ocean%20Rim%20Association.pdf>
8. Kupakar, "China's naval base(s) in the Indian Ocean—signs of a maritime Grand Strategy?," *Journal of Strategic Anaysis*, 41.3, 2017
9. Scott, David. 2017. "Chinese Maritime Strategy for The Indian Ocean". CIMSEC. <http://cimsec.org/chinese-maritime-strategy-indian-ocean/34771>
10. Scott (2017)
11. Glaser, Bonnie S. 2014. China's Grand Strategy in Asia". Center for Strategic and International Studies. [https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy\\_files/files/attachments/ts140313\\_glaser.pdf](https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/attachments/ts140313_glaser.pdf)
12. Ministry of Foreign Affairs of Japan (2007). "Confluence of the Two Seas", pidato oleh H.E. Mr. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan kepada Parliament of The Republic of India. Diakses melalui laman <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/speech-2.html>
13. Ibid.
14. Sheridan, Greg (2008). 'How to lose friends', *The Australian*. Diakses pada laman <http://www>.



- theaustralian.com.au/archive/news/how-to-lose-friends/news
15. Cronin, Patrick M. dan Baruah, Darshana M. 2014. "The Modi Doctrine for the Indo-Pacific Maritime Region". *The Diplomat*. Diakses pada laman <https://thediplomat.com/2014/12/the-modi-doctrine-for-the-indo-pacific-maritime-region/>
  16. Mohan, C. Raja. (2017). Donald Trump's 'Indo-Pacific' and America's India Conundrum. *ISAS Insights*. No 476.
  17. Lukin, Artyom. 2018. Putin's Silk Road Gamble. *The Washington Post*. Accessed at [https://www.washingtonpost.com/news/the-worldpost/wp/2018/02/08/putin-china/?utm\\_term=.4ac96ab243c6](https://www.washingtonpost.com/news/the-worldpost/wp/2018/02/08/putin-china/?utm_term=.4ac96ab243c6)
  18. Ibid.
  19. Ibid.
  20. Lihat Schubert, Jeff. (2017). New Eurasian Age: China's Silk Road and The EAEU in SCO Space. <http://russianeconomicreform.ru/wp-content/uploads/2017/08/New-Eurasian-Age-with-Chinese-Silk-Road-and-EAEU-in-SCO-Space-Update.pdf>
  21. Medcalf (2014). Ibid.
  22. Mohan, C. Raja. (2017). Donald Trump's 'Indo-Pacific' and America's India Conundrum. *ISAS Insights*. No 476.
  23. Commonwealth of Australia. 2013. Defence White Paper 2013. Diakses pada laman [http://www.defence.gov.au/whitepaper2013/docs/WP\\_2013\\_web.pdf](http://www.defence.gov.au/whitepaper2013/docs/WP_2013_web.pdf).
  24. Natalegawa, M. M. (2013, May 16). An Indonesian Perspective on the Indo - Pacific. Keynote address at the CSIS conference on Indonesia. Washington, Washington D.C., United States: CSIS. Retrieved from [http://csis.org/files/attachments/130516\\_MartyNatalegawa\\_Speech.pdf](http://csis.org/files/attachments/130516_MartyNatalegawa_Speech.pdf)
  25. Ram, Vignesh (2015). The Proposal for an Indo-Pacific Treaty of Friendship and Cooperation: A Critical Assessment. *Journal of ASEAN Studies*, Vol. 3, No. 1 (2015), pp. 22-31
  26. Sambhi, N. (2013). Do we need an Indo-Pacific treaty? Braton, ACT: ASPI. Diakses pada laman <http://www.aspistrategist.org.au/do-we-need-an-indo-pacific-treaty/>
  27. Waidyatilake, Barana (2017). The Indian Ocean Rim Association: Scaling Up?. *ISAS Working paper No 262*. Diakses pada laman <https://www.isas.nus.edu.sg/ISAS%20Reports/ISAS%20Working%20Papers%20No.%20262-%20The%20Indian%20Ocean%20Rim%20Association.pdf>
  28. Kementerian Luar Negeri RI. Indian Ocean Rim Association. Diakses pada laman <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/IORA.aspx>
  29. [https://www.kemlu.go.id/Buku/JAKARTA%20CONCORD\\_FINAL\\_not%20signed.pdf](https://www.kemlu.go.id/Buku/JAKARTA%20CONCORD_FINAL_not%20signed.pdf)
  30. Waidyatilake, Barana (2017). Ibid.
  31. Nurhasya, Muhamad Jaki (2017). Indonesia's Take on South China Sea White Hull Race. *The Jakarta Post*. Diakses pada halaman <http://www.thejakartapost.com/academia/2016/11/24/indonesias-take-on-south-china-sea-white-hull-race.html>
  32. Waidyatilake, Barana (2017). Ibid.